

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan¹, sedangkan penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan²

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena penulis berusaha melakukan analisa terhadap urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana media sosial *facebook* terhadap penyebaran berita bohong.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan³

¹ Peter Mahmud Merzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm 35.

² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, **Penelitian Hukum (*legal research*)**, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm 19.

³ Ibid, hlm 110

Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan jenis penelitian ini sangat tepat digunakan untuk mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang ada terkait dengan isu hukum urgensi dan konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana media sosial *facebook* terhadap penyebaran berita bohong.

C. Jenis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas sehingga sifatnya mengikat dan membuat masyarakat taat pada hukum seperti misalnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1) Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1
- b. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)

2) Uni Eropa

⁴ **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm. 25

- a. *Netzwerkdurchsetzungsgesetz (Act to Improve Enforcement of the Law in Social Networks)* (Hukum Penegakan Jaringan)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini tidak autoritatif melainkan bersifat hasil pemikiran dan pendapat para ahli yang terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, literatur, jurnal-jurnal hukum, dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer maupun sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam mengumpulkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 2 (dua) metode antara lain:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu yang diteliti, dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang dapat dibuat pedoman.

2. Internet

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengakses *website* atau jurnal-jurnal *online* terkait dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁵ Hal ini dilakukan untuk menemukan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana perbandingan tanggung jawab penyedia media sosial terhadap penyebaran berita bohong. Di Indonesia dan di Jerman, beserta kekurangan dan kelebihan masing-masing.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan terkait urgensi dan konsep pengaturan pertanggungjawaban pidana media sosial *facebook* terhadap penyebaran berita bohong. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut antara lain:

1. Mengumpulkan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Kegiatan yang dilakukan terhadap bahan hukum primer adalah menganalisa pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diteliti. Pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan hukum dari buku-buku, literatur-literatur, dan jurnal-jurnal hukum terkait. Bahan hukum tersier dilakukan dengan mengumpulkan kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu diartikan secara teoritis.

⁵ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 96

2. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikualifikasikan, disederhanakan, maupun difokuskan terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis.
3. Bahan hukum yang telah disederhanakan kemudian dikaji dengan aturan hukum materiil dan dihubungkan dengan teori-teori dan doktrin-doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran dengan cara penafsiran (intepretasi) hukum.⁶ Metode penafsiran (intepretasi) hukum tersebut berupa: Interpretasi gramatikal.
4. Intepretasi gramatikal, adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa.⁷ Intepretasi gramatikal dilakukan terhadap pasal-pasal yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan urgensi pengaturan pencegahan dan penanganan penyebaran berita bohong (*false news*) melalui media sosial *facebook*. Intepretasi komparatif memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum dan dicari kejelasan makna peraturan perundang-undangan tersebut. Intepretasi komparatif dilakukan dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan di Jerman terkait tanggung jawab penyedia media sosial terhadap penyebaran berita bohong (*false news*).

F. Definisi Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan beberapa definisi konseptual untuk

⁶ Sunaryati Hartono, **Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20**, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 152-153

⁷ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 164-165

menghindari adanya perbedaan penafsiran atas judul penelitian di atas, antara lain:

1. Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the*

***Top*)** adalah penyedia semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi berbasis protokol internet.

2. Berita Bohong (*False News*) berita bohong adalah sebuah pemberitaan yang

tidak benar dan dibuat serta dikemas sedemikian rupa hingga merupai berita yang benar dan bertujuan untuk mengiringi opini masyarakat sehingga menganggap berita bohong tersebut merupakan berita yang benar adanya. Tujuan nya untuk menipu dan/atau mengakali pembaca/pendengarnya.

3. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Urgensi dalam perubahan KUHP

harus didasarkan dengan pertimbangan politis, praktis, dan sosiologis.⁸ Pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang agar hukum di Indonesia bisa semakin dinamis mengikuti perkembangan masyarakat.

⁸ Soedarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Penerbit Almunir, Bandung, 1981, hlm 70-71.